



Ahok Beber Modus 'Nyolong' PNS

ICW Sebut Korupsi Disdik Tahun 2014 Capai Rp 278 Miliar

POLA pikir Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, yang suka mencicipi uang dari sebuah proyek sulit diubah. Terutama, PNS yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan anggaran besar seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) baik PU Tata Air maupun Bina Marga.

Hal tersebut dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Contoh rehab gedung, gimana cara oknum SKPD nyuri duit rehab gedung? Main dengan konsultan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin (26/3). Basuki juga membeberkan cara bawahannya 'memainkan' anggaran.

Dia tahu mulai dari awal hingga akhir proyek. "Gimana cara nyolongnya? Jumlah hari kerja orang swasta seminggu, dia bikinnya 3 bulan, swasta kerja 10 orang, dia (PNS) laporin 60 orang. Itu nyolongnya begitu," kata Basuki juga. Bukan hanya itu, biasa PNS juga melakukan *mark up* pada anggaran bahan bangunan.

"Terus alat yang dipakai batu lima kubik, dia buat tujuh," beber juga mantan Bupati Belitang Timur tersebut. "Saya tahu kok. Makanya proyek-proyek pemerintah itu semuanya mahal. Nah makanya ini kesempatan kita sisir, kalau kemarin kita susah sisir nih," cetusnya lagi.

Tak cuma anggaran di Disdik DKI, Ahok juga menemukan PNS nakal memainkan anggaran Dinas PU terkait pembangunan separator busway. "Misal bikin separator busway, tinggal beli aja, dia pikir enggak ada untung nih. Dia enggak mau, seolah-olah yang nyoret DPRD. Yang dia mau ada untung, dia suruh masukin. Nah itu yang terjadi. Begitu keluar ke sana, ke Mendagri beda," cetusnya juga.

Kasus semacam ini membuat Ahok semakin yakin penerapan *e-budgeting* begitu penting. "Jadi kan enggak bisa semba-

rang ngisi lagi. Langsung benturan tuh, langsung dua versi, itu yang diangkat oleh DPRD. Itu strategi. Nah sekarang DPRD selesai, ada lagi cerita dua versi. Sekarang tinggal satu yang pemda, saya beresin oknum SKPD yang 'main' siapa. Saya mau ke Mendagri begitu tahu siapa yang 'main', kita stafin aja udah," tegasnya.

Lebih jauh, Ahok mengaku tak mempermasalahkan penggunaan peraturan gubernur (pergub) anggaran 2014 senilai Rp 72,90 triliun. Meski nilai itu lebih kecil dibanding pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 senilai Rp 73,08 triliun, tapi Ahok justru mengaku masih kelebihan uang.

"Kami sisir lagi anggaran 2015 dan kami potong biaya pemeliharaan, alat tulis kantor (ATK), termasuk perjalanan dinas ke luar negeri. Kami dapat Rp 1,2 triliun, kelebihan duit berarti," paparnya juga. Tambahan uang itu berasal dari pemangkasan anggaran setelah evaluasi dari Kemendagri. Kelebihan anggaran tersebut, akan disuntikkan ke Bank DKI dan Dinas Bina Marga DKI.

Sementara itu, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, pihaknya memiliki data berupa dokumen kontrak, proses lelang pembentukan harga, hingga pemilihan pemenang lelang yang dinilainya janggal di Disdik DKI.

Dia menaksir kerugian negara yang disebabkan proyek-proyek yang ada di dinas yang mengurus pendidikan di Ibu Kota itu mencapai Rp 278 miliar.

"Itu termasuk di dalamnya UPS, printer *scan* tiga dimensi, ada buku, dan ada beberapa lagi dugaan paket kegiatan, terutama dinas pendidikan tahun 2004 lalu," kata Firdaus.

Karena itu, Firdaus berharap jika akhirnya KPK mengusut laporan itu akan menjadi awal perbaikan sistem dan pengelo-

laan APBD DKI Jakarta. Dia juga mengatakan, pengusutan kasus ini juga akan menjadi gerbang untuk menguak berbagai persoalan 'permainan' APBD lainnya di DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan dengan adanya konflik masalah RAPBD 2015 terkait anggaran 'siluman' antara Gubernur Ahok dengan DPRD DKI yang kemudian muncul dugaan korupsi akan memunculkan beberapa dugaan kasus korupsi lainnya di Pemprov DKI," cetusnya juga. (**wok**)



Berbagai Cara PNS Akali Uang Negara

*berbagai sumber



1. Mark up proyek

- Modus :
- Penggelembungan anggaran
 - Penggelembungan jumlah pekerja
 - Menambah waktu pelaksanaan
 - Pengurangan kualitas bahan bangunan

2. Pembuatan SPPD (surat perintah perjalanan dinas)

- Modus :
- SPPD fiktif
 - SPPD ditambah waktu pelaksanaan
 - SPPD dikurangi fasilitas
 - Bekerjasama dengan pihak hotel atau biro perjalanan

3. Dengan oknum DPRD memuluskan proyek

- Modus :
- Memasukkan proyek dalam APBD
 - Menunjuk rekanan anggota dewan atau PNS mengerjakan proyek daerah

4. Permintaan uang suap/pemerasan

- Modus :
- Membantu memberikan proyek
 - Memuluskan proyek tertentu
 - Membantu pengurusan izin tertentu

5. Nepotisme

- Modus :
- Pemberian proyek kepada keluarga dan rekan dengan imbalan
 - Pemberian perlindungan
 - Pengangsiran barang negara untuk Pribadi atau keluarga
 - Penggunaan peralatan atau sumberdaya keuangan publik untuk kepentingan keluarga

ANGGA GUMELAR/INDOPOS